



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan *good governance*, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gresik dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Gresik, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Drs. SUKARDI, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19720710 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	3
1.5. Gambaran Umum SKPD	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kab. Gresik	15
A. Tujuan	15
B. Sasaran Strategis	15
2.2. Indikator Kinerja Utama	15
2.3. Program dan Kegiatan	17
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2. Analisis Capaian Kinerja	26
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	35
B. Saran	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPBD Kab. Gresik	9
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Tahun 2025.....	10
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai per Bidang Tahun 2025	10
Tabel 1.3 Data Sarana dan Prasarana	11
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
Tabel 2.2 Program dan Kegiatan.....	17
Tabel 3.2.1 Pengukuran capaian kinerja dengan target perjanjian kinerja	26
Tabel 3.2.2 Pengukuran capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	27
Tabel 3.2.3 Pengukuran capaian kinerja dengan target akhir renstra	28
Tabel 3.2.4 Pengukuran capaian kinerja dengan rata-rata capaian nasional.....	29
Tabel 3.2.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	31
Tabel 3.2.6 Efektivitas penggunaan sumber daya	33
Tabel 3.2.7 Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja	34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025, disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Data-data yang diperoleh, berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja, dengan menggunakan informasi aktual yang diperoleh pada saat pra, saat bencana dan pasca bencana.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga BPBD Kabupaten Gresik dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel sehingga visi Pemerintah Daerah dapat tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029;
10. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/1360/HK/437.12/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
2. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
3. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Nomor 700/2301.5/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025 :

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Agar melakukan perbaikan atas indikator dan target pada Renstra serta penyelarasan pada Renja	Telah dilakukan perbaikan atas indikator dan target pada Renstra serta penyelarasan pada Renja
2	Melakukan reviu Renstra secara berkala dengan melengkapi dokumen seperti analisa dan evaluasi faktor pendorong dan penghambat yang mengarah pada tindak lanjut yang diperlukan pada periode berikutnya sehingga tidak sebatas laporan perkembangan capain (progress)	Telah dilakukan reviu Renstra secara berkala.
3	Meningkatkan kualitas penyajian laporan kinerja dengan penyampaian informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang data kinerja, baik target kinerja maupun realisasi kinerja, penjelasan terkait pencapaian target kinerjanya, efisiensi anggaran dan telah diperbandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya, tetapi tidak bisa membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (<i>benchmark</i> kinerja) karena tidak ada yang bisa di perbandingkan

1.5. Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik adalah :

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Gresik berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD selaku ketua Unsur Pengarah. Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran dan masukan kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengarahan dalam penyelarasan, perencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 2) Pengarahan dalam pelaksanaan pengkajian dan analisis pemetaan Daerah rawan bencana;
- 3) Pengarahan dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 4) Pengarahan dalam pelaksanaan konsolidasi, sosialisasi dan fasilitasi dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- 5) Pengarahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menghimpun bantuan bencana;
- 6) Pengarahan dalam pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. Unsur Pelaksana.

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Gresik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari. Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat; pascabencana. Unsur Pelaksana BPBD

Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi pengoordinasian, pengkomandoan; dan pelaksana.

Susunan Organisasi unsur Pelaksana terdiri atas :

a. Kepala Pelaksana

Kepala pelaksana BPBD dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian unsur Pelaksana BPBD melalui satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
- 2) Pengkoordinasian unsur Pelaksana BPBD melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan pada tahap dalam rangka penanganan darurat bencana;
- 3) Pelaksanaan kegiatan unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, ketatausahaan dan perlengkapan rumah tangga kantor. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretaris dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan kearsipan;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- 4) Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- 5) Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- 6) Penyusunan pelaporan kinerja program dan kegiatan;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas:

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketata usahaan;
- Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;
- Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan bencana. Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Pelaksana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 2) Penyelenggaraan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 3) Penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- 4) Pemantauan terhadap lokasi rawan bencana dan persiapan sarana dan prasarana kesiagaan dalam menghadapi bencana;
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- 6) Pelaksanaan pelaporan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai bidang tugasnya;

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penanganan kondisi darurat, menghimpun dan mendistribusikan bantuan logistik pada lokasi kejadian bencana. Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan kedaruratan dan logistik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dalam penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik bantuan bencana;
- 3) Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalian bantuan dan pendistribusian bantuan bencana;
- 4) Penyelenggaraan penyediaan penampungan dan upaya darurat lainnya dalam penanggulangan bencana;
- 5) Pelaksanaan pengaturan dalam pendistribusian logistik korban bencana;
- 6) Pemantauan terhadap penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- 8) Pelaksanaan pelaporan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sesuai bidang tugasnya.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekontruksi terhadap sarana dan prasarana sosial dasar yang mengalami kerusakan akibat korban bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

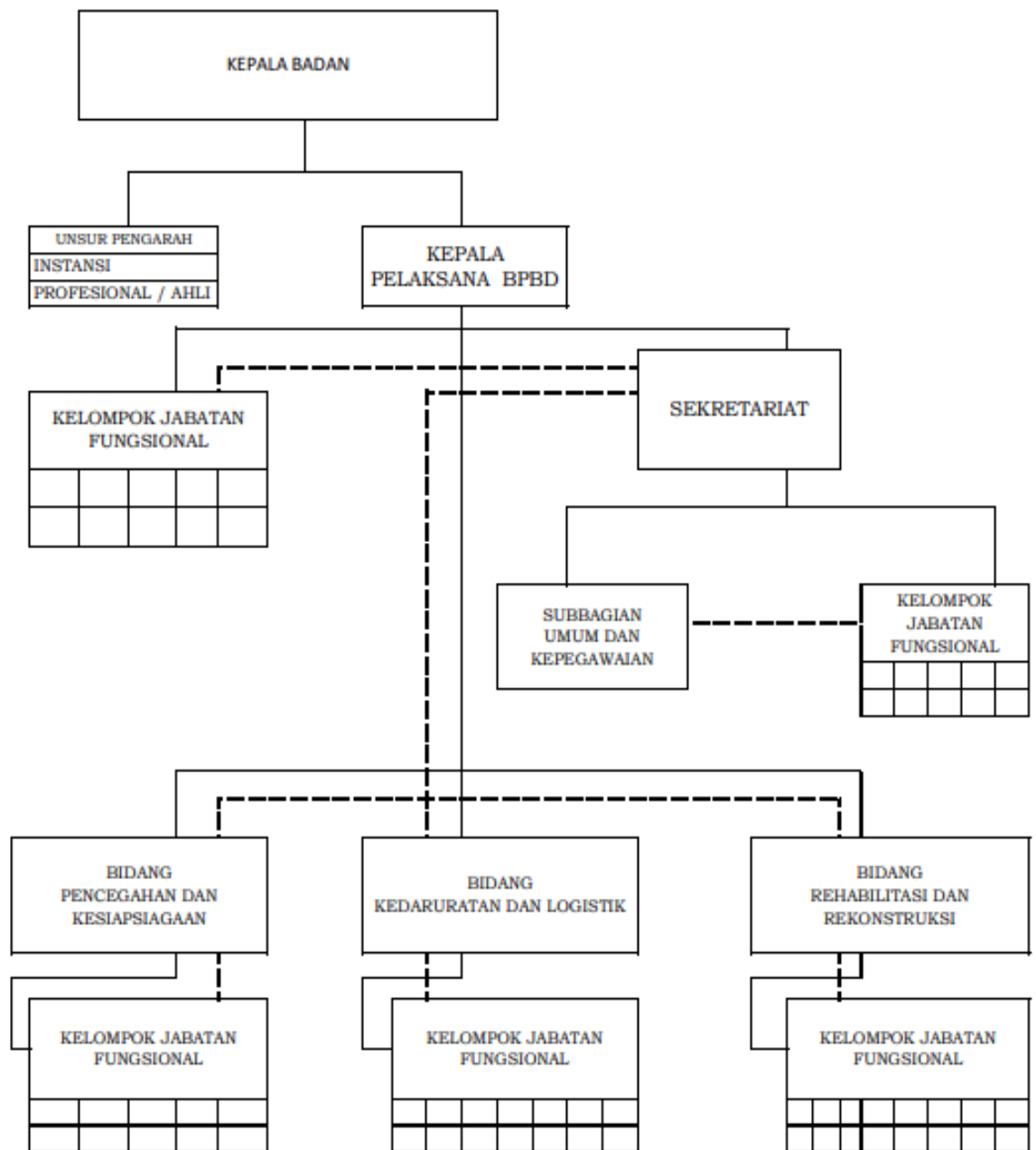
- 1) Penyusunan usulan dalam bentuk rumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;

- 2) Pelaksanaan analisa dan studi kelayakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
 - 4) Pelaksanan koordinasi dan mobilisasi rehabilitasi dan rekonstruksi penaggulangan korban bencana;
 - 5) Penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
 - 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing bidang. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing1masing pengelompokan uraian fungsi bidang.

Dibawah ini disajikan Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gresik berdasarkan Perda Nomor 82 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BPBD Kab. Gresik
Perbup No.82 Tahun 2021



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN BPBD Kab. Gresik Tahun 2025

NO	KLASIFIKASI PEGAWAI	JUMLAH	LAKI	PEREMPUAN
1.	ASN	38	19	19
2.	Non ASN	17	12	5
	Jumlah	55	31	24

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai BPBD Kab. Gresik per Bidang Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kepala Pelaksana BPBD	1
2.	Sekretariat	18
3.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9
4	Bidang Kedaruratan dan Logistik	19
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	8
	Jumlah	55

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana BPBD

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	SUMBER BARANG	KETERANGAN (UNIT)		
1	2	3	4	5	6		
01 ALAT TRANSPORTASI					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Mobil Rescue Ranger	1	Unit	BNPB	1	0	0
2	Mobil Turonggo Tirta	1	Unit	APBD	1	0	0
3	Mobil Navara	1	Unit	APBD	1	0	0
4	Mobil Innova	1	Unit	APBD	1	0	0
5	Mobil Expander	3	Unit	APBD	3	0	0
6	Mobil Terios	1	Unit	APBD	1	0	0
7	Mobil Avanza	1	Unit	APBD	1	0	0
8	Truk Serbaguna	1	Unit	BNPB	1	0	0
9	Mobil Tangki Air	5	Unit	BNPB	5	0	0
10	Mobil Pick up	2	Unit	BNPB & APBD	2	0	0
11	Sepeda Motor Trail	9	Unit	BNPB	8	0	1
12	Sepeda Motor Bebek	1	Unit	APBD	1	0	0
13	Sepeda Motor Matic	8	Unit	APBD	8	0	0
14	Motor Roda Tiga (M-BIZ)	1	Unit	APBD	1	0	0
15	Trolley Perahu	1	Unit	APBD	1	0	1
02 ALAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	HT Analog	8	Unit	BNPB	0	0	8
2	HT POC	10	Unit	APBD	10	0	0
3	GPS	5	Unit	BNPB	2	0	0
4	Repiter	2	Unit	BNPB	2	0	0
5	RIG	1	Unit	APBD	1	0	0
6	Megaphone	2	Unit	BNPB	2	0	0
7	Kamera Waterproof	2	Unit	APBD	2	0	0
8	Handycam	1	Unit	BNPB	0	0	1
9	Rambu Rawan Bencana	12	Unit	APBD	12	0	0
10	Rambu Jalur Evakuasi	12	Unit	APBD	12	0	0
11	Proyektor	2	Unit	APBD	2	0	0
12	Tripod	1	Unit	APBD	1	0	0
13	CCTV	10	Unit	APBD	9	1	0
14	Camera canon	3	Unit	APBD	3	0	0
15	camera film	1	Unit	APBD	1	0	0
16	Video Conference	1	Unit	APBD	1	0	0
17	Unit Tranceiver Ssb Protable	1	Unit	APBD	1	0	0
18	sound system	3	Unit	APBD	3	0	0
19	wareless	1	Unit	APBD	1	0	0
20	Wireless Acces Point	1	Unit	APBD	1	0	0

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	SUMBER BARANG	KETERANGAN (UNIT)		
1	2	3	4	5	6		
03 ALAT Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Headlamp Petzl	5	Unit	APBD	5	0	0
2	Helm Petzl	12	Unit	APBD	12	0	0
3	Sepatu Karang	5	Unit	APBD	5	0	0
4	Alat Pemotong Baja	1	Unit	BNPB	0	0	1
5	Rompi Pelampung	45	Unit	APBD	45	0	0
6	Ring Boy	20	Buah	APBD	20	0	0
7	Perahu Karet 8 Orang	4	Unit	BNPB	0	0	4
8	Perahu Karet 10 Orang	4	Unit	BNPB	3	0	1
9	Perahu Karet 6 Orang	5	Unit	BNPB	1	0	4
10	Speedboat	1	Unit	BNPB	0	0	1
11	Perahu Polythene	1	Unit	BNPB	1	0	0
12	Perahu Rafting	4	Unit	BNPB	0	0	4
13	Perahu Fiber	1	Unit	BNPB	1	0	0
14	Perahu Lipat Portable	2	Unit	BNPB	2	0	0
15	Perahu evakuasi	10	Unit	APBD	10	0	0
16	Mesin Perahu 25 pk	4	Unit	APBD&BNPB	2	0	2
17	Mesin Perahu 15 pk	4	Unit	BNPB	2	0	2
18	Mesin Perahu 18 pk	1	Unit	BNPB	0	1	0
19	Mesin Perahu 40 pk	1	Unit	BNPB	0	0	1
20	Mesin Perahu 8 pk	1	Unit	BNPB	0	1	0
21	Dayung	56	Unit	BNPB	56	0	0
22	Teropong/ Teleskop	1	Unit	BNPB	1	0	0
23	Chain Saw Multipro	5	Unit	BNPB	5	0	0
24	Katelpak	5	Pasang	APBD	5	0	0
25	Alat Pemadam Kebakaran	3	Unit	APBD	3	0	0
26	Linggis	5	Unit	BPBD Provinsi	5	0	0
27	Cangkul	5	Unit	BPBD Provinsi	5	0	0
28	Sekop	10	Unit	BPBD Provinsi	10	0	0
29	Gerobak	1	Unit	APBD	1	0	5
30	Drone	1	Unit	APBD	0	1	0
31	Compressor Oksigen Selam	1	Unit	APBD	1	0	0
32	Chain Saw	8	Unit	BNPB	8	0	0
33	Alat Selam	2	Unit	APBD	2	0	0
04 ALAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Tenda Keluarga	28	Unit	APBD	4	4	20
2	Tenda pengungsi	4	Unit	APBD	0	4	0
3	Tenda Pleton	4	Unit	CSR	0	4	0
4	Tenda Posko	2	Unit	BPBD Provinsi	2	0	0
5	Tenda Regu	3	Unit	CSR	3	0	0

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	SUMBER BARANG	KETERANGAN (UNIT)		
1	2	3	4	5	6		
6	Velbed	20	Unit	BNPB	10	0	10
7	Water Treatment Portable	1	Unit	BNPB	0	0	1
8	Water treatment Mini	4	Unit	BNPB	4	0	0
9	Kompor Gas	6	Unit	APBD	0	0	6
10	Tabung gas 6 kg	1	Unit	APBD	1	0	0
11	Tangga Aluminium	6	Unit	APBD	2	0	0
12	TANGGA ALUMINIUMMULTIFUNGSI (T.LIPAT)	1	Unit	APBD	1	0	0
13	Compressor Angin	2	Unit	APBD	2	0	0
14	Mesin Penyedot Air	3	Unit	APBD	2	0	1
15	Tandu	12	Unit	BNPB	7	0	5
16	Ban Dalam	20	Pcs	BPBD Provinsi	20	0	0
17	Mesin Las	1	Unit	APBD	1	0	0
18	Mesin Bor	1	Unit	APBD	1	0	0
19	Pompa Jinjing	2	Unit	BNPB	2	0	0
20	Pompa Alkon	5	Unit	BNPB	5	0	0
21	Pompa 6 Hp	3	Unit	BNPB	3	0	0
22	Televisi	7	Unit	APBD	6	0	1
23	AC	25	Unit	APBD	17	0	8
24	Tandon	70	Unit	APBD	70	0	0
25	Profil Tank	12	unit	APBD	12	0	0
26	Panci Dapur Umur	4	Unit	APBD	2	0	2
27	Meja resepsionist	1	Unit	APBD	1	0	0
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Unit	APBD	4	0	0
29	Meja Kerja Pegawai Non Struktural/Staff	15	Unit	APBD	15	0	0
30	Meja kerja + Kursi kerja	1	Unit	APBD	1	0	0
31	Meja Tamu	1	Unit	APBD	1	0	0
32	meja computer	10	unit	APBD	5	0	0
33	Meja rapat	7	unit	APBD	7	0	0
34	Kursi Tamu	2	Unit	APBD	2	0	0
35	Kursi putar	27	Unit	APBD	15	6	6
36	Kursi kerja eselon II	2	Unit	APBD	2	0	0
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit	APBD	3	0	0
38	kursi Rapat	3	Unit	APBD	3	0	0
39	lemari kayu	1	Unit	APBD	1	0	0
40	Almari besi	2	Unit	APBD	2	0	0
41	Almari	4	Unit	APBD	2	0	0
42	Lemari besi metal	8	Unit	APBD	8	0	0
43	Lemari Sorok	2	Unit	APBD	2	0	0
44	Lemari Loker	3	Unit	APBD	3	0	0
45	Lemari es	1	Unit	APBD	1	0	0
46	Lemari arsip	8	unit	APBD	8	0	0
47	Rak Besi	1	Unit	APBD	1	0	0
48	Rak tangga Besi	1	Unit	APBD	1	0	0
49	Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	APBD	1	0	0
50	Mesin Penghitung Uang	1	Unit	APBD	1	0	0
51	Mesin ketik	2	Unit	APBD	0	1	1
52	Kloset portable	7	Unit	APBD	0	0	7
53	Exhaust Fan	6	Unit	APBD	4	0	2

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	SUMBER BARANG	KETERANGAN (UNIT)		
1	2	3	4	5	6		
54	Mesin Ketik	1	Unit	APBD	0	0	1
55	Peta	1	Unit	APBD	0	0	1
56	Brankas	1	Unit	APBD	1	0	0
57	Papan Struktur	3	Unit	APBD	1	0	2
58	Papan Pengumuman	1	Unit	APBD	1	0	0
59	papan visi misi	1	Unit	APBD	1	0	0
60	papan baliho	4	Unit	APBD	0	0	4
61	Papan Nama Instansi	1	Unit	APBD	1	0	0
62	Kipas Uap	1	Unit	APBD	1	0	0
63	Vacum Cleaner	1	Unit	APBD	1	0	0
05 ALAT PENERANGAN DAN KELISTRIKAN					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Senter	6	Unit	BNPB	0	0	6
2	Solar Cell Generator	2	Unit	BPBD Provinsi	2	0	0
3	Solar Camping Lantern	13	Unit	BNPB	8	0	5
4	Genset 5 KVA	1	Unit	APBD	0	1	0
5	Genset 650 Watt	3	Unit	BNPB	0	0	3
6	Genset Multipro	3	Unit	BPBD Provinsi	3	0	0
7	Lampu Sorot	1	Unit	APBD	0	1	0
8	Search Light	1	Unit	BNPB	1	0	0
9	Portable Led Light Tower Baselght 420 x	1	Unit	BNPB	1	0	0
10	Portable Led Light Tower UGT-4000 LMH	5	Unit	BNPB	5	0	0
06 ALAT DETEKSI DINI					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	EWS Banjir	3	Unit	APBD	3	0	0
2	EWS Pergerakan Tanah	4	Unit	APBD	3	0	1
3	EWS Gempa Bumi	2	Unit	BMKG, BNPB	2	0	0
07 ALAT KOMPUTER					BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	PC unit	12	Unit	APBD	6	0	6
2	Handphone Tab	1	Unit	APBD	1	0	0
3	Komputer PC	6	Unit	APBD	3	0	3
4	Note book	16	Unit	APBD	5	4	7
5	printer	32	Unit	APBD	15	0	17
6	Laptop	11	Unit	APBD	9	1	1
7	Monitor/Display	1	Unit	APBD	1	0	0
8	Scanner	1	Unit	APBD	1	0	0
9	Hard disk eksternal	1	Unit	APBD	1	0	0
10	Unit Power Supply	3	Unit	APBD	3	0	0
11	hardisk	1	Unit	APBD	1	0	0

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Gresik

A. Tujuan

Tujuan adalah yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai dengan lima tahun kedepan, serta menggambarkan arah strategis organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu: ***Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing.***

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rumusan Renstra BPBD Kab. Gresik merupakan indikator pencapaian tujuan strategis. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya *outcome* dari semua program yang telah ditetapkan. Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata.

❖ sasaran strategis yang disusun BPBD Kab. Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. Menurunnya risiko bencana;
- c. Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana;
- d. Meningkatnya pemulihan pasca bencana;

❖ sasaran strategis yang disusun BPBD Kab. Gresik Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana;

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. BPBD Kabupaten Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra BPBD Kabupaten Gresik periode 2021 - 2026 dan periode 2025 - 2029, sebagaimana tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENSTRA PERIODE 2021 - 2026				RENSTRA PERIODE 2025 - 2029			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase penanganan pra bencana	100%	100%	100%	Report base data penanganan pra bencana				
2	Menurunnya risiko bencana	Persentase desa tangguh bencana	90,91%	94,89%	104,38 %	Report base data desa tangguh bencana				
3	Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	Persentase Penanganan saat bencana	100%	100%	100%	Report base data penanganan saat bencana				
4	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100%	100%	100%	Report base data pasca bencana				
5	Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)					0,46	0,47	102,17	Laporan desa tangguh bencana
		Penurunan Kerugian Pasca Bencana (Persentase)					30%	30%	100%	Laporan data kerugian pasca bencana
6	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)					0,28	0,28	100	Data Relawan

2.3. Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang kebencanaan, sebagaimana berikut ini :

Kode	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Keluaran			Ket.
		Anggaran	Realisasi		Rencana	Realisasi	Satuan	
		Rp	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.785.497.443,00	7.418.387.180,19	84,44				
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.785.497.443,00	7.418.387.180,19	84,44				
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.272.195.733,00	5.378.280.138,19	85,75				
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.657.800,00	8.590.500,00	99,22	1 Jenis	1 Jenis	Jenis	
1.05.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.657.800,00	8.590.500,00	99,22	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen	
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.600.267.000,00	3.357.289.110,19	93,25	38 orang	38 orang	Orang	
1.05.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.600.267.000,00	3.357.289.110,19	93,25	38 orang	38 orang	Orang	
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.126.638.333,00	752.836.326,00	66,82	8 Jenis	8 Jenis	Jenis	
1.05.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.666.300,00	11.058.930,00	94,79	1 Paket	1 Paket	Paket	

Kode	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Keluaran			Ket.
		Anggaran	Realisasi		Rencana	Realisasi	Satuan	
		Rp	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.051.600,00	17.967.573,00	14,14	1 Paket	1 Paket	Paket	
1.05.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.046.500,00	5.421.906,00	89,67	1 Paket	1 Paket	Paket	
1.05.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.963.800,00	62.033.325,00	94,04	1 Paket	1 Paket	Paket	
1.05.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.267.513,00	16.065.260,00	83,38	1 Paket	1 Paket	Paket	
1.05.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.656.000,00	8.906.000,00	92,23	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	
1.05.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.459.820,00	92.891.417,00	97,31	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	
1.05.01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	791.526.800,00	538.491.915,00	68,03	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.379.600,00	30.130.950,00	27,05	1 Jenis	1 Jenis	Jenis	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.379.600,00	30.130.950,00	27,05	10 Unit	6 Unit	Unit	
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	847.452.400,00	761.722.981,00	89,88	2 Jenis	2 Jenis	Jenis	

Kode	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Keluaran			Ket.
		Anggaran	Realisasi		Rencana	Realisasi	Satuan	
		Rp	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.002.400,00	112.953.381,00	91,83	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	
1.05.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	724.450.000,00	648.769.600,00	89,55	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.800.600,00	467.710.271,00	80,95	3 Jenis	3 Jenis	Jenis	
1.05.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	432.217.100,00	421.965.271,00	97,63	36 Unit	36 Unit	Unit	
1.05.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.070.500,00	45.745.000,00	86,20	6 Unit	6 Unit	Unit	
1.05.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.513.000,00	-	0,00	1 Unit	0 Unit	Unit	
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.513.301.710,00	2.040.107.042,00	81,17				
1.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	235.026.500,00	211.292.070,00	89,90				
1.05.03.2.01.0004.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	45.976.100,00	44.692.320,00	97,21	60 Orang	60 Orang	Orang	

Kode	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Keluaran			Ket.
		Anggaran	Realisasi		Rencana	Realisasi	Satuan	
		Rp	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.03.2.01.0008.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	189.050.400,00	166.599.750,00	88,12	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	
1.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	993.315.900,00	869.775.672,00	87,56				
1.05.03.2.02.0015.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	53.772.400,00	27.039.611,00	50,29	98 Unit	30 Unit	Unit	
1.05.03.2.02.0018.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	74.202.900,00	53.243.800,00	71,75	300 Orang	100 Orang	Orang	
1.05.03.2.02.0019.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	13.890.000,00	13.622.000,00	98,07	22 Keluarga	22 Keluarga	Keluarga	
1.05.03.2.02.0020.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	32.163.000,00	22.520.000,00	70,02	1 Kawasan	1 Kawasan	Kawasan	
1.05.03.2.02.0021.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	103.332.800,00	92.874.661,00	89,88	150 Orang	150 Orang	Orang	
1.05.03.2.02.0022.	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	140.370.400,00	137.414.100,00	97,89	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	
1.05.03.2.02.0023.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	750.000,00	747.500,00	99,67	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	

Kode	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Keluaran			Ket.
		Anggaran	Realisasi		Rencana	Realisasi	Satuan	
		Rp	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.03.2.02.0026.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	29.203.600,00	27.943.600,00	95,69	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	
1.05.03.2.02.0027.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	142.210.800,00	134.107.800,00	94,30	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	
1.05.03.2.02.0028.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	403.420.000,00	360.262.600,00	89,30	20 Kawasan	20 Kawasan	Kawasan	
1.05.03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	864.375.050,00	589.660.950,00	68,22				
1.05.03.2.03.0001.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	
1.05.03.2.03.0002.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	342.025.000,00	245.769.500,00	71,86	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	
1.05.03.2.03.0009.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	514.467.250,00	341.011.450,00	66,28	1.500 Orang	1.500 Orang	Orang	
1.05.03.2.03.0010.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	3.000.000,00	-	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	
1.05.03.2.03.0012.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2.002.800,00	-	0,00	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	

Kode	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Keluaran			Ket.
		Anggaran	Realisasi		Rencana	Realisasi	Satuan	
		Rp	Rp	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.05.03.2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	420.584.260,00	369.378.350,00	87,83				
1.05.03.2.04.0003.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	37.444.700,00	24.590.000,00	65,67	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	
1.05.03.2.04.0005.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	366.144.960,00	327.896.350,00	89,55	1 Laporan	1 Laporan	Laporan	
1.05.03.2.04.0014.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	16.994.600,00	16.892.000,00	99,40	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	
Jumlah		8.785.497.443,00	7.418.387.180,19	84,44				

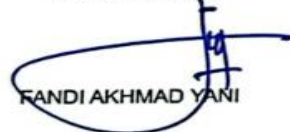
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan bentuk perjanjian dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Gresik Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

A. Perjanjian Kinerja Renstra 2021 - 2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK				
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1	Persentase penanganan pra bencana	100 %
2	Menurunnya risiko bencana	1	Persentase desa tangguh bencana	90.91 %
3	Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	1	Persentase penanganan saat bencana	100 %
4	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	1	Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,722,517,635.87	APBD
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 2,349,312,197.00	APBD
Jumlah			Rp. 9,071,829,832.87	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 13 Januari 2025
PIHAK KESATU
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN GRESIK

Drs. SUKARDI, M.M.
Pembina Tk.I
NIR 19720710 199203 1 011

B. Perjanjian Kinerja Renstra 2025 - 2029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	1	Rasio Desa Tangguh Bencana	0.46 Rasio
		2	Penurunan Kerugian Pasca Bencana	30 Persen
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	1	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana	0.28 Rasio

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,272,195,733.00	PAPBD
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 2,513,301,710.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 8,785,497,443.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

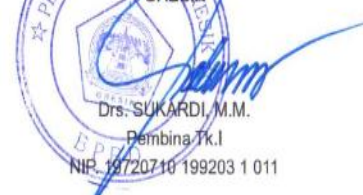

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN

GRESIK


Drs. SUKARDI, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19720710 199203 1 011

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja sebagai upaya pengembangan strategi organisasi kedepan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performasi masing-masing bidang dan sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan entry point untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam hal pengumpulan data kinerja dimaksudkan agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektifitas. Untuk melakukan pengumpulan data kinerja secara efektif dan efisien perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Pelaksana BPBD dengan Bupati Gresik Tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	Renstra Tahun 2021 - 2026				Renstra Tahun 2025 - 2029			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase penanganan pra bencana	100%	100%	100%	Sangat Baik				
2	Menurunnya risiko bencana	Persentase desa tangguh bencana	90,91%	94,89%	104,38 %	Sangat Baik				
3	Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	Persentase Penanganan saat bencana	100%	100%	100%	Sangat Baik				
4	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100%	100%	100%	Sangat Baik				
5	Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)					0,46	0,47	102,17	Sangat Baik
		Penurunan Kerugian Pasca Bencana (Persentase)					30%	30%	100%	Sangat Baik
6	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)					0,28	0,28	100	Sangat Baik

3.2.2 Penukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

a. Untuk Renstra Tahun 2021 - 2026

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase penanganan pra bencana	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Menurunnya risiko bencana	Persentase desa tangguh bencana	47.73%	59.09%	70.45%	81.82%	94.89%	
3	Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	Persentase Penanganan saat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100%	100%	100%	100%	100%	

b. Untuk Renstra Tahun 2025 - 2029

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	KETERANGAN
1	Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)	0.40	0,47	Meningkat
		Penurunan Kerugian Pasca Bencana (Persentase)	30%	30%	sama
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)	0.28	0,28	sama

3.2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis

a. Untuk Renstra Tahun 2021 - 2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase penanganan pra bencana	100%	100%	=
Menurunnya risiko bencana	Persentase desa tangguh bencana	100%	94,89%	-
Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	Persentase Penanganan saat bencana	100%	100%	=
Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100%	100%	=

b. Untuk Renstra Tahun 2025 - 2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)	0.69	0,47	-
	Penurunan Kerugian Pasca Bencana (Persentase)	42.5%	30%	-
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)	0.34	0,28	-

3.2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Rata – Rata Capaian Nasional/Provinsi Jatim/Kab. Kota Lain

a. Untuk Renstra Tahun 2021 - 2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB.KOTA LAIN	PERANGKAT DAERAH	LEBIH RENDAH/LEBIH TINGGI
Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase penanganan pra bencana	N/A	N/A	Tidak Dapat Dibandingkan
Menurunnya risiko bencana	Persentase desa tangguh bencana	Provinsi Jawa Timur	BPBD Kabupaten Blitar	Lebih Rendah
Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	Persentase Penanganan saat bencana	N/A	N/A	Tidak Dapat Dibandingkan
Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	N/A	N/A	Tidak Dapat Dibandingkan

b. Untuk Renstra Tahun 2025 - 2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB.KOTA LAIN	PERANGKAT DAERAH	LEBIH RENDAH/LEBIH TINGGI
Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	N/A	N/A	Tidak Dapat Dibandingkan
	Penurunan Kerugian Pasca Bencana (Persentase)	N/A	N/A	Tidak Dapat Dibandingkan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)	N/A	N/A	Tidak Dapat Dibandingkan

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

a. Untuk Renstra Tahun 2021 - 2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase penanganan pra bencana	Analisis Keberhasilan : Infrastruktur mitigasi memadai seperti sistem peringatan dini berfungsi, adanya sarana evakuasi, jalur aman dan tempat pengungsian tersedia	Simulasi evakuasi dan pelatihan kesiapsiagaan
Menurunnya risiko bencana	Persentase desa tangguh bencana	Analisis Keberhasilan : Terbentuknya forum pengurangan risiko bencana desa	Monitoring dan evaluasi secara berkala
Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	Persentase Penanganan saat bencana	Analisis Keberhasilan : Peralatan evakuasi, kendaraan operasional, logistik tersedia, kesadaran masyarakat untuk evakuasi meningkat	Penyusunan rencana kontijensi dan SOP yang jelas
Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	Analisis Keberhasilan : Respon cepat pemerintah dan lembaga terkait, Partisipasi masyarakat dan relawan tinggi	Penguatan sistem manajemen bencana terpadu

b. Untuk Renstra Tahun 2025 - 2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)	Analisis Keberhasilan : Terbentuknya forum pengurangan risiko bencana desa	Monitoring dan evaluasi secara berkala
	Penurunan Kerugian Pasca Bencana (Persentase)	Analisis Keberhasilan : Rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat	Rehabilitasi dan Rekonstruksi berbasis risiko
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)	Analisis Keberhasilan : Keterlibatan masyarakat aktif	Pelatihan relawan kebencanaan

3.2.6 Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

a. Untuk Renstra Tahun 2021 - 2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN PAPBD	REALISASI PAPBD	CAPAIAN KEUANGAN	CAPAIAN KINERJA	EFISIENSI
Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase penanganan pra bencana	6.900.313.133	5.904.058.280,19	85,56%	100%	-2,54%
Menurunnya risiko bencana	Persentase desa tangguh bencana	308.651.783	269.494.383	87,31%	104,38 %	-3,90%
Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	Persentase Penanganan saat bencana	712.215.050	437.500.950	61,43%	100%	2,91%
Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	420.584.260	369.378.350	87,83	100%	5,63%

b. Untuk Renstra Tahun 2025 - 2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN PAPBD	REALISASI PAPBD	CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA	EFISIENSI
Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)	94.768.217	90.768.217	95,78%	102,17	8,60%
	Penurunan Kerugian Pasca Bencana (Persentase)	196.805.000	195.027.000	99,10%	100%	3,46%
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)	152.160.000	152.160.000	100%	100	0,00%

3.2.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

a. Untuk Renstra Tahun 2021 - 2026

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persentase penanganan pra bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
Menurunnya risiko bencana	Persentase desa tangguh bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	Persentase Penanganan saat bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase Rencana Pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

b. Untuk Renstra Tahun 2025 - 2029

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	Penurunan Kerugian Pasca Bencana (Persentase)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Gresik ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2025, dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2025 ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pegawai BPBD Kabupaten Gresik, baik bidang teknis maupun non teknis serta adanya dukungan dari stakeholders/mitra kerja.

B. Saran

Hambatan dan kendala yang terjadi tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Dalam menanggulangi kendala dan hambatan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik telah melakukan beberapa strategi dan upaya yang telah diimplementasikan dengan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah dan organisasi lintas sektoral terkait.

Beberapa saran bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat mengantisipasi terjadinya hambatan yang seharusnya dapat dikendalikan;
2. Melakukan koordinasi internal dan eksternal secara intensif dengan instansi terkait maupun dengan lembaga/kemitraan agar pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dapat berjalan secara optimal;
3. Mengoptimalkan kegiatan jitupasna bersama instansi terkait dalam melakukan pendataan dalam menghitung jumlah korban, dampak maupun kerugian yang diakibatkan bencana sehingga bisa dilakukan penanganan segera dengan skala prioritas;

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJiP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi kepentingan yang lebih besar dan semoga menjadi bahan pertimbangan evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Namun demikian dalam penyusunan LKJiP ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, masukan-masukan yang positif, kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan LKJiP dapat tercapai lebih baik lagi.

Gresik, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK



Drs. SUKARDI, M.M.
Pembina Tk.I

NIP. 19720710 199203 1 011

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUKARDI, M.M.

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 13 Januari 2025

PIHAK KESATU
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN GRESIK



Drs. SUKARDI, M.M.

Pembina Tk.I

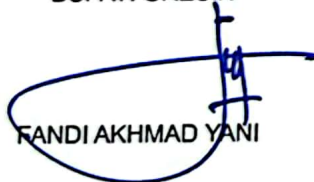
NP.19720210 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	1	Persentase penanganan pra bencana	100 %
2	Menurunnya risiko bencana	1	Persentase desa tangguh bencana	90.91 %
3	Meningkatnya responsifitas penanganan saat bencana	1	Persentase penanganan saat bencana	100 %
4	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	1	Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,722,517,635.87	APBD
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 2,349,312,197.00	APBD
Jumlah			Rp. 9,071,829,832.87	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 13 Januari 2025

PIHAK KESATU

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN GRESIK


Drs. SUKARDI, M.M.
Pembina Tk.I
NIR 19720710 199203 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUKARDI, M.M.

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDIAKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN GRESIK


Drs. SUKARDI, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19720710 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan ketangguhan Desa terhadap bencana dan menurunkan kerugian pasca bencana	1	Rasio Desa Tangguh Bencana	0.46 Rasio
		2	Penurunan Kerugian Pasca Bencana	30 Persen
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	1	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana	0.28 Rasio

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,272,195,733.00	PAPBD
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 2,513,301,710.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 8,785,497,443.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025
 PIHAK KESATU
 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
 GRESIK


 Drs. SUKARDI, M.M.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19720710 199203 1 011